

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN PANIAI**

***EFFECTIVENESS OF REGIONAL ASSETS USE IN THE FINANCIAL AGENCY AND
REGIONAL ASSETS OF PANIAI REGENCY***

***1Yance Nawipa**

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar
yancenawipa2@gmail.com

²Sadly Abdul Djabar

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar
abdul.djabar@unifa.ac.id

³Mujahid

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar
mujahid@unifa.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine how regional assets are used at the Paniai Regency Regional Finance and Asset Agency. The research method used was a descriptive qualitative approach, with data analysis through interviews and field observations. Key informants were obtained through interviews with five individuals. The results indicated that the asset utilization system is ineffective. Asset management still lacks an integrated application, human resources are low, they have never participated in training, workshops, or workshops on asset management, the planning system is suboptimal, assets are controlled by certain individuals in large numbers, and some assets are used by individuals outside the scope of the Regional Work Unit (SKPD). Internal factors include the suboptimal competence of managing officials, who have never participated in technical guidance, training, or training on asset management. External factors include the lack of a specific budget allocation for human resource development for asset management, as well as social, cultural, and geographic conditions, as well as public awareness of participation and understanding the importance of properly protecting, maintaining, and managing assets.

Keywords: *Effectiveness, Use of Regional Assets, Financial Agencies and Regional Assets.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penggunaan Aset daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai. Metode Penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian dengan sistem kualitatif deskriptif dengan analisis data melalui metode wawancara dan observasi lapangan. *Informan Key* kami peroleh melalui wawancara dengan 5 orang. Hasil penelitian menyatakan bahwa Sistem penggunaan aset belum efektif Dimana pengelolaan aset masih belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi, kondisi sumber daya manusia yang rendah, Dimana mereka belum pernah mengikuti diklat, workshop, atau pelatihan tentang pengelolaan aset, sistem perencanaan yang belum maksimal, aset yang dikuasai oleh oknum tertentu dalam jumlah yang banyak serta beberapa aset digunakan oleh oknum diluar tupoksi SKPD, adanya faktor internal yakni kompetensi pejabat pengelola belum maksimal dimana mereka selama ini belum pernah mengikuti Bimbingan teknis, Diklat atau pelatihan mengenai pengelolaan aset. Faktor Eksternal yakni Belum ada alokasi Anggaran khusus untuk peningkatan sumberdaya Manusia pe gelola aset serta kondisi sosial, budaya serta letak geografis, dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan memahami pentingnya menjaga, memelihara dan mengelola aset dengan baik.

Kata kunci: Efektivitas, Penggunaan Aset Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah.

PENDAHULUAN

Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance*) merupakan salah satu tuntutan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu akan tergantung pada aparat pengelolanya. Sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 BAB I Point 1.5 Isu Strategis RB tentang Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik. BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam Undang-Undang (UU NO 5 tahun 2014 tentang ASN yang terdiri dari komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif, serta budaya Integritas Tinggi dan Pelayanan Prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/lembaga/pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/lembaga/Pemerintah daerah. Oleh karena itu perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan. Dalam Bab II Fokus penajaman Road Map RB 2.1.2 Sasaran Strategis RB point 2) dikatakan bahwa terciptanya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku kinerja dan daya saing tinggi.

Menjelaskan sasaran dari BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif). Salah satunya adalah Akuntabel. Penyelenggara Negara terutama pengelola aset dituntut untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya serta menggunakan kekayaan negara secara bertanggung jawab. Terwujudnya pengelolaan aset yang optimal merupakan wujud keberhasilan dari proses yang direncanakan sehingga mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah dijelaskan dalam Pasal 9 bahwa " Gubernur/bupati/wali kota sebagai pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang Milik daerah berwenang dan bertanggungjawab Menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang milik daerah; Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; Menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; Menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik daerah; Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD; Menyetujui usul pemindahtanganan,

Permusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan Menyetujui usul Pemanfaatan Barang Milik daerah, selain Pemanfaatan dalam bentuk Sewa pada pengguna Barang.

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah). Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara Pasal 1 Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kabupaten Paniai merupakan salah satu daerah di Indonesia yang terletak di wilayah terpencil dengan segala keterbatasan, baik itu dari segi infrastruktur, kondisi geografis, kondisi sosial, Sumberdaya Manusia, Teknologi serta lainnya. Kondisi geografis yang menantang, ditambah dengan keterbatasan dalam hal jumlah personal dan kompetensi sumber daya manusia, membuat pelayanan pada sektor pemerintahan mengalami kendala, khususnya di bidang pengelolaan Aset Daerah, menjadi kurang optimal.

Jika melihat penjelasan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah Pasal 1 ayat 4. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Daerah, ayat 9 "Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan, namun kenyataannya terdapat beberapa Barang milik daerah atau Aset yang digunakan oleh oknum yang tidak mempunyai kepentingan atau digunakan diluar dari tujuan organisasi pemilik Aset hal ini dapat kita baca pada tabel 1.

Tabel 1. Aset (Barang Milik Daerah) yang digunakan oleh pihak Lain

NO	JENIS ASET	Nilai	Tahun Pembelian	SKPD PEMILIK	PENGGUNA/LOKASI	KET
1	Sepeda Motor Honda Supra	30.000.000	2006	Dinas Perhubungan	XX Pindah ke Intan Jaya	tidak sesuai
2	Warless	6.050.000	2009	Dinas Perhubungan	Tidak dapat ditelusuri	tidak sesuai
3	Mobil Toyota Pick Up 6 Roda	552.200.000	2010	Dinas Perhubungan	Dikuasai pihak lain	tidak sesuai
4	Genset	9.500.000	2007	Dispora	Pribadi	tidak sesuai
5	Mobil Pick Up	125.000.000	2006	Dinas PUPR	Pribadi/ Almarhum	tidak sesuai
6	Laptop	30.000.000	2007	Dinas PUPR	Pribasi /Eks Kadis	tidak sesuai
7	Toyota Hilux	450.379.775	2021	Dinas Perhubungan	Satpol PP	tidak sesuai
8	Speed Boat Lengkap	604.650.000	2019	Dinas Perhubungan	KONI	tidak sesuai
9	Toyota Hilux	332.970.000	2013	Dinas Perhubungan	Mantan Kadis	tidak sesuai
10	Toyota Fortuner	540.800.000	2021	Dinas Kependudukan	Pegawai yang telah pindah	tidak sesuai

Sumber: Bidang Aset BKAD Kab. Paniai 2024

Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa terdapat beberapa Aset yang di gunakan oleh pihak lain yang tidak memiliki hubungan kerja dengan SKPD pemilik Aset atau digunakan tidak untuk tujuan organisasi. Selain itu juga terdapat Pembelian barang yang tidak dilengkapi dengan harga Perolehan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6.e Pengguna Barang Milik Negara Berwenang dan bertanggung jawab “menggunakan Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan Penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/Lembaga”

Hal lain yang tidak sesuai dengan Aturan Penggunaan Aset atau Barang Milik Daerah dapat dilihat pada tabel 2

Tabel 2. Aset (Barang Milik Daerah) yang Adminsitration Pencatatannya kurang teliti

NO	JENIS ASET	Nilai	Tahun Pembelian	SKPD PEMILIK	PENGGUNA/LOKASI	KET
1	Mesin motor Boat	-	2010	Dinas Perhubungan	Dibagikan Kepada Masyarakat tanpa Berita Acara	tidak sesuai
2	Pengadaan Meubelair	236.544.000	2007	Dinas PUPR	Belum Jelas rinciannya	tidak sesuai
3	Warless	6.050.000	2009	Dinas Perhubungan	Tidak dapat ditelusuri	tidak sesuai
4	Kursi Ligna	24.750.000	2009	Dinas Perhubungan	Tidak dapat ditelusuri	tidak sesuai
5	Laptop	15.000.000	2011	Dinas PUPR	Tidak ada BAST	tidak sesuai

Sumber : Bidang Aset BKAD Kab. Panai 2024

Dari Tabel 2 dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa Aset atau Barang Milik daerah yang administrasinya tidak lengkap sehingga diantaranya terdapat Barang Milik Daerah yang diserahkan tanpa ada Berita acara Penyerahan Barang, serta ada yang tidak dapat ditelusuri Keberadaannya. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6 Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan Bertanggung jawab:

- Melaksanakan pengadaan Barang Milik Negara sesuai dengan Ketentuan Peraturan perundang-Undangan
- Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik daerah yang berada dalam penguasaannya
- Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaannya

Beberapa Aset yang hilang juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Oleh Bidang Aset hal ini dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Aset yang Hilang

NO	JENIS ASET	Nilai	Tahun Pembelian	SKPD PEMILIK	PENGGUNA/LOKASI	KET
1	Mesin Babat Rumput	5.000.000	2007	Dinas PUPR	Hilang	tidak sesuai
2	Tablet Galaxy	-	2022	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai
3	Finger Print Scanner Biomof	-	2022	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai
4	Tangki Air Fiber Glass	7.236.600	2008	Dinas PUPR	Hilang	tidak sesuai
5	Tangki Air Fiber Glass	7.236.600	2008	Dinas PUPR	Hilang	tidak sesuai
6	Kursi Pejabat Eselon II	5.513.850	2008	Dinas PUPR	Hilang	tidak sesuai
7	Laptop	-	2022	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai
8	CPU	5.500.000	2016	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai
9	Tripod Kamera	25.600.000	2016	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai
10	Iris Scanner	22.000.000	2016	Dinas Kependudukan	Hilang	tidak sesuai

Sumber: Bidang Aset BKAD Tahun 2024

Tabel 3 menunjukkan data beberapa aset yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab penggun Aset untuk menjaga atau memelihara Aset negara yang berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu juga kewajiban bagi Pengguna atau Pengurus Barang Pengguna untuk mengadakan Penghapusan Barang Milik Daerah (Aset). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara BAB II Pelaksanaan Penghapusan BMN Pada Pengelola Barang Pasal 4 "Sebab-sebab Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. merupakan sebab-sebab yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab Penghapusan, seperti rusak berat, hilang, susut, menguap, mencair, kadaluarsa, mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan, dan sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*). Dijelaskan pula dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Petubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 6. Pengguna Barang Milik Negara berwenang dan Bertanggung jawab : f "mengamankan dan memelihara Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaanya"

Pengunaan Aset secara berlebihan juga dapat ditemui di Kabupaten Paniai seperti yang terlihat pada tabel 4

Tabel 4. Aset yang dikuasai oleh orang tertentu dalam jumlah yang banyak dengan jenis yang sama

NO	JENIS ASET	Nilai	Tahun Pembelian	SKPD PEMILIK	PENGGUNA/LOKASI
1	Handy Cam & Asscesories	26.387.800	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
2	Handy Cam & Asscesories	26.387.800	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
3	Interphone	32.047.850	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
4	Sound system & asscecori	22.548.680	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
5	Sound system & asscecori	22.548.680	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
6	Solar cell besar	12.922.500	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
7	Solar cell besar	12.922.500	2008	Dinas PUPR	AA Ex Pegawai PUPPR
8	Komputer Desktop	12.062.500	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
9	Komputer Desktop	12.062.500	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
10	Komputer Desktop	12.062.500	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
11	Komputer Desktop	12.062.500	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
12	Printer	5.000.000	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
13	Printer	5.000.000	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
14	Printer	5.000.000	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag
15	Printer	5.000.000	2007	Dinas Perindag	BB Ex Pegawai Perindag

Sumber: Bidang Aset BKAD Kabupaten Paniai 2024

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa beberapa Aset di gunakan oleh orang tertentu dengan jenis yang sama dan jumlah yang banyak dan pengunyanapun telah pensiun atau tidak lagi berkantor di mana Aset tersebut di bukukan. Hal ini tentu kurang efisien dan berkaitan dengan azas manfaat dimana aset tersebut yang seharusnya bisa digunakan oleh beberapa orang namun kenyataannya hanya digunakan oleh satu orang. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Petubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 483 ayat:

- Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi dalam rangka penertiban Barang milik Daerah yang meliputi Penggunaan; Pemanfaatan; Pemindahtanganan.
- Pengelola Barang melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk Mengamati pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan; dan Menilai kesesuaian dari pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Selain daftar Aset dari Kartu Inventaris Barang dari Bidang Aset juga temuan Badan Pemeriksa Keuangan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Paniai T.A 2023 dapat dilihat pada tabel 5

Tabel 5. Aset tetap yang tidak memiliki Informasi yang jelas dan lengkap

NO	JENIS ASET	Jenis register	Nilai Perolehan (Rp.)
	KIB B (Peralatan dan Mesin)		
1	Kendaraan tidak ada informasi Nomor BPKB, Nomor Polisi, Nomor Mesin dan Nomor rangka	49	11.229.115.902
	KIB C (Gedung dan Bangunan)		
2	Gedung dan Bangunan tidak ada informasi lokasi/ alamat dan luasan	37	51.875.589.829
	KIB D (Jalan Irigasi dan Jaringan)		
3	Jalan Irigasi dan Jaringan tidak ada infromasi lokasi/alamat dan luasan	9	4.108.975.000
	Jumlah		67.213.680.731

Sumber : LHP BPK RI Pemerintah Kab. Paniai T.A 2023

Dari tabel 5 kita dapat melihat bahwa Aset tetap yang tidak memiliki informasi yang jelas dan lengkap nilainya cukup besar. Kondisi ini tentu tidak sesuai dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Lampiran I.08:PSA No:07 tentang Akuntansi Aset tetap pada paragraf 49 yang menyatakan bahwa “pengeluaran setelah prolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tetang pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 10 huruf d, f, dan g dan Pasal 12 ayat 3 huruf b dan c.

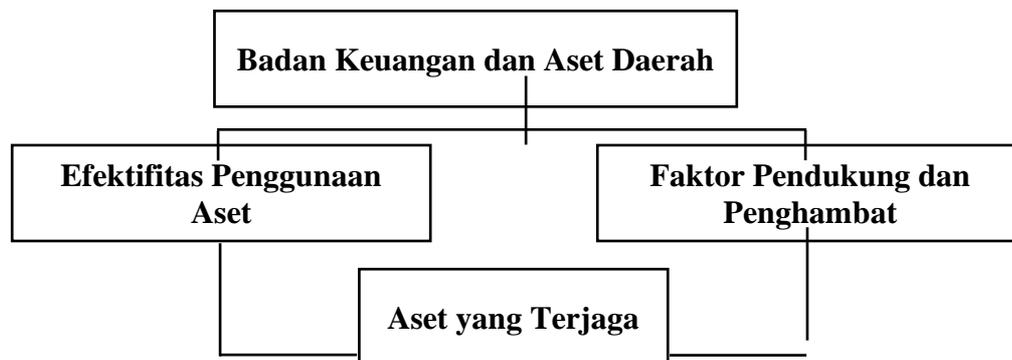
Berkaitan dengan Efektifitas Pemanfaatan Aset Daerah dimana ada beberapa faktor yang menghambat pemanfaatan aset Daerah Bidang pertanian yakni : 1. Administrasi yang belum dikelola dengan baik diman administrasi merupakan hal

sangat penting sekali disaat sekarang ini. Administrasi yang dikelola dengan baik akan membawa pengaruh yang baik pula.2. Sumber Daya Manusia yang belum optimal, dimana suatu organisasi akan berhasil dalam mencapai tujuan yang telah dicapai ditentukan ketika sumberdaya manusianya bekerja dengan baik. Potensi dari sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap organisasi dalam mencapai tujuan hal ini merupakan hasil penelitian dari Meli Andani, Zulkarnaini yang berjudul Efektivitas Pemnafaatan Aset Daerah Bidang Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu

Mokodompit et all (2017) yang berjudul Analisis Pengelolaan Barang Milik daerah di Pemerintahan Kotamobagu menyatakan bahwa: ada beberapa kendala dalam pengelolaan Barang milik daerah di Pemerintahan Kotamubagu. Ada 4 Kendala yakni: 1. Pegamanan dan pemeliharaan, 2. Penilaian, 3. Penghapusan, 4. Kepatuhan.

Beberapa kesimpulan di tarik dari uraian masalah tentang pemanfaatan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Paniai yakni Beberapa Aset Pemerintah Kabupaten Paniai digunakan diluar Tugas pokok dan fungsi SKPD terkait, dimana terdapat Aset yang digunakan pegawai yang telah pensiun atau pegawai yang berada di kantor lain, atau telah dipindahtangankan; Terdapat Barang Milik daerah yang administrasinya tidak lengkap diantaranya terdapat beberapa pengadaan Barang Milik Daerah yang diserahkan tanpa ada Berita acara Penyerahan Barang, serta ada yang tidak dapat ditelusuri Keberadaanya; Aset yang hilang namun tidak dibuatkan Berita Acara Kehilangan; Terdapat Aset atau Barang Milik Daerah yang tidak terdapat harga perolehannya hal ini berakibat sulitnya menghitung jumlah aset dalam Laporan keuangan; Terdapat beberapa aset dalam jenis yang sama dengan jumlah yang banyak dikuasai oleh orang tertentu yang sudah pensiun atau tidak bertugas lagi dimana aset tersebut dibukukan.

Berikut ini digambarkan kerangka konseptual penelitian sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kabupaten Paniai Jalan Frans Keisepo Kampung Enarotali, Paniai, Provinsi Papua Tengah. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu Juli – Agustus Tahun 2025. Adapun *Informan Key* yang akan diwawancarai sebanyak 5 orang. Instrument penelitian yang digunakan Adalah observasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

Tahapan analisis data yang digunakan yaitu Pengorganisasian data, Memasukkan data, Menganalisis data. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dalam situs yang dikembangkan oleh Miles Huberman. Data yang sudah terkumpul dibuat dalam matriks. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analysis Interactive Model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Penggunaan Aset Daerah.

Peneliti melakukan beberapa wawancara terhadap informan untuk mendapatkan informasi perihal Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai.

Hasil wawancara terhadap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Paniai tentang Efektivitas Penggunaan Aset daerah pada yang dilaksanakan pada ruang Kepala Badan pada hari rabu tanggal 23 Juli 2025 pukul 11.00 WIT sebagai berikut:

“Sistem pengelolaan aset Daerah di Kabupaten Paniai sangat krusial baik dari segi penggunaan, administrasi, pencatatan, pemanfaatan serta pelaporannya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi pemerintah Kabupaten Paniai saat ini. Pencatatan aset yang tidak akurat membuat beberapa aset tidak diketahui keradaanya/hilang. Juga terdapat beberapa aset yang masih di gunakan oleh oknum yang telah pensiun atau yang tidak ada kepentingan langsung terhadap aset yang digunakan. Terdapat juga beberapa aset yang telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi namun belum belum diadakan penghapusan. Semrawutnya pengelolaan aset berdampak pada Laporan Hasil Pengawasan BPK yang setiap tahun mengangkat temuan tentang pengelolaan Aset Daerah yang tidak maksimal.

Hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada ruang Kepala Kepala Bidang pada hari jumat tanggal 1 Agustus 2025 pada pukul 13.00 WIT sebagai berikut:

“Pengelolaan aset Daerah di Kabupaten Paniai diketahui kurang maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya dari segi penggunaan, administrasi, pencatatan, pemanfaatan serta pelaporannya. Hal ini merupakan masalah yang sangat serius yang dihadapi pemerintah Kabupaten Paniai saat ini. Pencatatan aset yang tidak akurat membuat beberapa aset tidak diketahui keradaanya/hilang. Juga terdapat beberapa aset yang masih di gunakan oleh oknum yang telah pensiun atau yang tidak ada kepentingan langsung terhadap aset yang digunakan. Terdapat juga beberapa aset yang telah rusak atau tidak dapat digunakan lagi namun belum belum diadakan penghapusan. Serta

beberapa aset digunakan oleh orang tertentu dalam jumlah yang banyak. Kurang maksimalnya pengelolaan aset tentu berpengaruh pada Laporan Hasil Pengawasan BPK yang setiap tahun mengangkat temuan tentang pengelolaan Aset Daerah yang tidak maksimal.”

Hasil wawancara terhadap Kepala Seksi/Kasubid Pengamanan dan Pengawasan Aset Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada ruang aset pada hari jumat tanggal 25 Juli 2025 pukul 10.00 WIT sebagai berikut:

“Pegelolaan aset Daerah di Kabupaten Paniai mengalami banyak masalah baik itu masalah administrasi, pengamanan, pencatatan, penggunaan, penghapusan, segi pengadaannya serta masih banyak masalah lain yang mengakibatkan penggunaan aset daerah di kabupaten Paniai kurang efektif. Selain karena maslaah adminsitrasi juga masalah kurangnya SDM pegelola, pengguna, serta tidak adanya aplikasi khusus untuk mengelola sistem administrasi aset. Malasah aaet setiap tahun menjadi kendala kami dalam menyusun laporan keuangan, hal ini lah sehingga pengelolaan aset setiap saat masuk dalam Laporan hasl pengawasan BPK yang dianggap kurang maksimal pengelolaannya”

Hasil wawancara terhadap Kepala Seksi/Kasubid Penghapusan Aset Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada Kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tanggal 24 Juli 2025 pukul 15.00 WIT sebagai berikut:

“Terdapat banyak kendala yang kami hadapai dalam mengelola aset daerah di Kabupaten Paniai, kurangnya SDM, Teknologi, masalah adminsitrasi, sistem pengadaan, penghapusan, penggunaan, pemeliharaan serta masih banyak hal lain yang, mengakibatkan sistem pengelolaan aset bermasalah. Berbagai masalah tersebut yang menjadi kendala kami setiap akhir tahun dalam menyusun laporan Keuangan. Hal ini juga yang mengakibatkan Laporan Hasil Pengawasan BPK selalu menuangkan temuan tentang pengelolaan aset Kabupaten Paniai yang kurang maksimal dalam pengelolaannya”

Hasil wawancara terhadap Bendahara Barang Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai di kantor BKAD Kab Paniai pada hari jumat tanggal 1 Agustus pukul 10.00 WIT sebagai berikut:

“Kami mengalami kesulitan dalam mengidentifkasi data aset yang kami kelola di SKPD kami hal ini karena terdapat beberapa aset yang dikuasai oleh oknum tertentu yang tidak sedang atau berkedudukan di kantor kami, selain terdapat beberapa aset dengan jenis yang sama dalam jumlah yang banyak yang dikuasai oleh orang tertentu , pengadaan aset yang berulang terkesan pemborosan, aset yang tidak diketahui keberadaanya, beberapa aset yang hilang tanpa adanya Surat keterangan hilang serta masih banyak lagi masalah yang kami hadapi dalam mengelola aset”

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset pada Badan Keuangan Daerah.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Paniai yakni : Faktor internal meliputi kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset, sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, serta perencanaan dan pengawasan yang baik. Faktor eksternal meliputi regulasi yang mendukung, kondisi ekonomi daerah, serta partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengawasan aset.

Hasil wawancara terhadap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset Daerah Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada ruang Kepala Badan sebagai berikut:

“Faktor Internal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset daerah Kabupaten Paniai adalah sumberdaya pengelola maupun pengguna aset yang kurang memadai , dimana pengelola aset kurang memahami tugas pokoknya selaku pengelola aset serta terdapat beberapa pengguna aset yang kurang memahami aturan penggunaan aset dimana terdapat beberapa aset yang bukan haknya namun tetap digunakan, penggunaan aset secara berlebihan oleh orang tertentu, belum tersedianya sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, sistem perencanaan pengadaan aset daerah yang belum maksimal dibuktikan dengan adanya pengadaan aset yang berulang, pengadaan secara berlebihan, serta sistem pengawasan yang belum maksimal. Sementara Faktor Eksternal adalah belum tersedianya Regulasi tentang penggunaan Aset yang bersifat mengikat, kurang patuh terhadap aturan, kondisi sosial budaya Kabupaten Paniai yang kurang kondusif, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset daerah serta mencegah terjadinya penyalahgunaan”

Hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang faktor- faktor yang mempengaruhi penggunaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai yang dilaksanakan pada ruang Kepala Bidang sebagai berikut:

“Faktor Internal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset daerah Kabupaten Paniai adalah sumberdaya pengelola maupun pengguna aset yang kurang memadai , dimana selama ini belum pernah diadakan pelatihan atau pendidikan dan Latihan tentang bagaimana mengelola aset yang baik dan benar sehingga membuat pengelola aset kurang memahami tugas pokoknya , Beberapa aset yang digunakan oleh oknum yang tidak mempunyai tugas pokok terhadap SKPD pemilik Aset, beberapa aset dikuasai oleh orang tertentu secara berlebihan, belum tersedianya sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi, sistem perencanaan pengadaan aset daerah yang belum maksimal dibuktikan dengan adanya pengadaan aset yang berulang, pengadaan secara berlebihan, serta sistem pengawasan yang belum maksimal . Sementara Faktor Eksternal adalah beberapa pengguna aset yang belum patuh terhadap aturan penggunaan aset, belum tersedianya Regulasi tentang penggunaan Aset yang bersifat mengikat, kondisi geografis serta kondisi sosial ekonomi Kabupaten Paniai yang kurang kondusif, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga aset daerah”

Hasil wawancara terhadap Kepala Seksi/Kasubid Pengamanan dan Pengawasan Aset Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai sebagai berikut:

“Kami menyadari salah satu faktor internal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset Daerah adalah adanya keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan, keterampilan, pengalaman dalam pengelolaan aset, serta pemeliharaan aset itu sendiri. Tidak adanya sistem yang dibuat untuk memantau pergerakan aset, inventarisasi, serta lainnya yang fungsinya untuk memudahkan dalam pengelolaan aset. . Sementara faktor eksternal adalah tidak tersedianya alokasi anggaran untuk kami untuk menambah ilmu, atau mengikuti bimbingan teknis, diklat atau semacamnya, kondisi sosial budaya serta letak geografis Kabupaten Paniai yang tidak stabil, serta kurangnya pemahaman masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemanfaatan dan pengawasan aset daerah”

Hasil wawancara terhadap Kepala Seksi/Kasubid Penghapusan Aset Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset daerah pada badan Keuangan dan Pengelola Aset Daerah Kabupaten Paniai sebagai berikut:

“Faktor internal yang memengaruhi efektivitas penggunaan Aset Daerah adalah sumber daya manusia yang sangat terbatas baik dari segi keterampilan, pengetahuan, pengalaman serta kualitas dalam mengelola aset daerah. Hal ini tentu berpengaruh pada pengelolaan aset yang kurang optimal untuk melakukan inventarisasi, penilaian, pemeliharaan serta penggunaan aset itu sendiri. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi adalah selama ini belum pernah ada alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi pengelola aset untuk meningkatkan pengetahuan tentang bagaimana mengelola aset yang benar dalam bentuk Bimbingan Teknis, Dilat, Pelatihan dan lain-lain. Belum ada sistem yang digunakan untuk mengelola Aset secara terintegrasi, Serta belum ada regulasi khusus yang diterbitkan oleh pemerintah tentang pengelolaan aset”

Hasil wawancara terhadap bendahara barang tentang faktor-faktor mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset daerah pada badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai sebagai berikut:

“Faktor Internal yang paling mempengaruhi efektivitas penggunaan aset adalah kurangnya pemahaman pengguna aset bagaimana menggunakan aset daerah, adanya kecerobohan sehingga kadang aset hilang, adanya oknum tertentu/ masyarakat luar yang menggunakan aset yang tidak mempunyai kepentingan atau hubungan terhadap SKPD pemilik aset, pengguna aset yang tidak mengembalikan aset yang digunakan padahal telah pindah atau mutasi, serta pengadaan aset daerah yang kadang berulang-ulang atau berlebihan sehingga dianggap pemborosan , sementara faktor eksternal adalah kurangnya dukungan pemerintah terhadap pengelola aset ditandai dengan belum pernah diadakan pelatihan atau diklat mengenai pengelolaan aset daerah oleh bendahara

barang ”

Pembahasan

Efektivitas Penggunaan Aset Daerah.

Observasi yang penulis lakukan Efektivitas Penggunaan Aset Daerah Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai penulis menemukan fakta dilapangan bahwa, sistem pengelolaan aset di kabupaten Paniai belum maksimal dimana terdapat berbagai kendala atau masalah yang dihadapi mulai dari proses perencanaan, penatausahaan, administrasi, pemeliharaan, pemindahtanganan, pemusnahan, pembinaan, pengawasan hingga pelaporan. Hal ini tentu belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah.

Pasal 1 Dalam Peraturan menteri ini, yang dimaksud dengan pasal ayat (27) Pengelolaan Barang Milik daerah adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penualian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pasal Ayat (46) Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara penulis terhadap *informan key* serta observasi yang dilakukan oleh penulis mengenai efektivitas penggunaan aset di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pania, penulis menarik kesimpulan masalah yang dialami sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa aset yang pengadaanya berulang dan digunakan oleh orang tertentu hal ini tentu merupakan sebuah pemborosan anggaran
2. Penatausahaan aset yang belum maksimal membuat aset Pemda semrawut
3. Terdapat beberapa aset yang tidka dapat dideteksi keberadaanya disebabkan karena hilang, berpindah tangan atau dikuasai oleh org diluar SKPD pemilik aset, atau diluar tupoksi
4. Pemeliharaan aset belum maksimal sehingga rentan terjadi kerusakan, atau pengadaan ulang yang tentu berujung pada pemborosan anggaran.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset pada Badan Keuangan Daerah.

Observasi yang penulis lakukan terhadap faktor- faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai penulis menemukan fakta dilapangan bahwa, faktor internal yang mempengaruhi adalah kompoetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia pengelola masih kurang optimal dimana selama ini tidak pernah diadakan peningkatan kompetensi pengelola melalui bimbingan teknis, Diklat atau pelatihan untuk pengelola / bandahara barang, Belum adanya sistem atau aplikasi terintegrasi yang digunakan untuk mengelola aset. Sistem perencanaan yang kurang optimal. Untuk Faktor eksternal adalah alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas pengeloala pengadaan barang/jasa tidak ada, kondisi sosial ekonomi, serta letak geografis Kabupaten Paniai sangat mempengaruhi dalam pengelolaan aset.

Dari hasil wawancara dengan *informan key* serta hasil observasi penulis menarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor Internal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset pada Badan Pengelolaan dan Aset daerah Kabupaten Paniai adalah:
 - a. Belum ada Aplikasi khusus atau sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA) yang digunakan untuk memantau pergerakan aset.
 - b. Lemahnya sistem Perencanaan tentang pengadaan aset sehingga terjadi pengdaaan aaet yang berulang atau berlebihan
 - c. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengelola maupun pengguna aset.
2. Faktor Eksternal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan aset Daerah adalah:
 - a. Belum ada alokasi Anggaran khusus untuk peningkatan sumberdaya Manusia Pengelola Aset terutama untuk Bimbingan Teknis, Diklat atau kegiatan lain yang tujuannya untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana megelola atau menggunakan aset Daerah
 - b. Kondisi Ekonomi, Sosial, Budaya serta Letak Geografis Kabupaten Paniai sangat mempengaruhi sistem pengelolaan aset
 - c. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola aset, baik berupa penggunaan aset serta pemeliharaan agar aset tetap terjaga

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Efektivitas Penggunaan Aset Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai maka peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Penggunaan aset belum efektif dimana Pengelolaan aset masih belum menggunakan Aplikasi yang terintegrasi, Kondisi sumber daya manusia yang masih rendah, pengelola aset belum pernah mengikuti Diklat, workshop atau pelatihan tentang pengelolaan aset dengan baik, Sistem Perencanaan yang belum maksimal, pengadaan yang berulang, penggunaan aset yang tidak sesuai dengan tupoksi dan peruntukannya, serta kondisi ekonomi, sosial dan letak geografis Kabupaten Paniai yang kurang mendukung.
2. Faktor faktor yang mempengaruhi Efektivitas penggunaan Aset pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paniai adalah :
 - a. Faktor Internal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset daerah adalah Kompotensi yang dimiliki oleh pengelola belum maksimal dimana mereka selama ini belum pernah mengikuti Bimbingan teknis, Diklat atau pelatihan mengenai pengelolaan aset; Belum tersedianya Sistem atau Aplikasi khusus untuk mengelola aset; Lemahnya sistem Perencanaan, kurangnya pengawasan serta pemeliharaan.
 - b. Faktor Eksternal yang mempengaruhi efektivitas penggunaan Aset Daerah Adalah Belum ada alokasi Anggaran khusus untuk peningkatan sumberdaya Manusia pengelola aset terutama untuk Bimbingan Teknis, Diklat atau kegiatan lain yang tujuannya untuk menambah pengetahuan mengenai pengelolaan aset; Kondisi Ekonomi, sosial, Budaya serta letak Geografis Kabupaten Paniai yang kurang kondusif; Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dan memahami pentingnya menjaga, memelihara dan mengelola aset dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat. (2008). Efektivitas Organisasi, Edisi Pertama. Jakarta : Airlangga
- Afdaluddin. (2021). Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Aset Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat : Universitas Hasanuddin
- Arifin. (2022). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah dengan Pengawasan dan Pengendalian Sebagai Variabel Mediasi pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jrnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial (JMPIS)
- Badudu, J. S. (2003). Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, Jakarta: Kompas.
- Habib, H. (2019). Pregaruh Persepsi Kemanfaatan dan Persepsi Kemudahan Webside UB terhadap Sikap pengguna dengan pendekatan TAM, Student Jurnal.
- Lismiani Agustin, Azhari Akmal Tarigan. (2002). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatra Utara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatra Utara
- Makodompit et al. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamubagu, Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"
- Meli Andari, Zulkarnaini. (2022). Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Bidang Pertanian di Kabupaten Indragiri Hulu, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.
- Miles, Mathew B and Michael Huberman dan saldana J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods soursbook*, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI- Pres
- Nugroho Yoyok Setyo. (2020), Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah Gedung Pontianak Convention Center Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Nurrohman, B. (2017). Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna meningkatkan Validalitas data kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang. Jurnal 10 No 6 Banten STISIP Banten Raya.
- Poerwadarminta W.J.S. (2002). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PT Balai Pustaka.
- Prevebtya Ayuna. (2024) *Navigasi Masa Depan: 7 Strategi Manajemen Aset Paling Efektif untuk Perusahaan*, Gamatechno
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi berbasis Akrua
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 16 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang milik Daerah

Sasriawan. (2021). Strategi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Universitas Hasanuddin.

Sondang P Siagian. (2002). *Kiat meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.